BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1.2 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Bandung Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja yaitu :

1. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR)
2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA)
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEF)
4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP)
5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD)

Pada tahuan 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Srtuktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja dirubah menjadi 7(tujuh) satuan unit kerja, yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pajak
3. Seksi Retribusi

4. IPEDA
5. Seksi perencanaan, Penelitian dan pembangunan;
6. UPTD Pasar
7. UPTD Parkir dan Terminal

Dalam kegiatan satuan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak/retribusi, dipakai system **MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah)** . Dengan sistem MAPENDA, petugas melakukan kegiatan pemungutan pajak/retribusi secara langsung kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi **"door to door"** .

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 Tahun1989 perlu disusun sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 Tentang Sistem Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II

seluruh Wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama **MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah)** .

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilakukan secara **"door to door"** menjadi **"self assesment"** yaitu wajib pajak dan wajib retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

Sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Awal mula pembentukan Bappeda bermula ketika pada tahun 1972 Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penyempurnaan Badan Perancang Pembangunan Daerah (Bappemda) Provinsi Jawa Barat dengan membentuk Badan Perancang Pembangunan Kotamadya (Bappemko) dan Badan Perancang Pembangunan Kabupaten (Bappemka), yang merupakan badan perencanaan pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal serta ditetapkan dengan SK Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 43 Tahun 1972.

Setelah berjalan 2 tahun, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dikukuhkan dan diakui dengan SK Presiden No. 15 Tahun 1974, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih berlaku SK Gubernur. Baru kemudian dengan SK Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara nasional. Dengan SK Presiden tersebut, lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau Bappeda Tingkat I dan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau Bappeda Tingkat II. Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden No. 27 Tahun 1980, yaitu:

1. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional;
2. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.

Dalam lingkup Kota Bandung sendiri, pembentukan Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung didasarkan pada Perda No. 21 Tahun 1981 dan Perda No. 24 Tahun 1981, sebagaimana telah mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Kota Bandung menata kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerahnya, termasuk merubah nama Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Bappeda Kota Bandung. Perubahan ini ditetapkan dengan Perda Kota Bandung No. 06 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, sedangkan uraian tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Perda No. 17 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

4.1.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Dipenda Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 23 Tahun tanggal 29 Mei 1989 sebagai pengganti Keputusan Mendagri No. KPUD 7/12/41-101 tahun 1978 dan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 sebagai pengganti Perda Kota Bandung Nomor 05 tahun 2001, berkedudukan sebagai Unsur Perumus dan Pelaksana Kebijakan Operasional Kota Bandung Di Bidang Pendapatan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Bandung disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007. Dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Kepala Bidang Perencanaan, membawahi :
    a. Seksi Data dan Potensi Pajak
    b. Seksi Program
    c. Seksi Analisa dan Pelaporan
4. Kepala Bidang Pajak Daerah, membawahi :
    a. Seksi pelayanan dan Pengaduan
    b. Seksi Penetapan dan Pembukuan
    c. Seksi Penagihan12
5. Kepala Bidang Pendapatan Pajak Bukan Pajak Daerah, membawahi :

a. Seksi Adminisrasi Bagi Hasil Pajak Pusat

b. Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Provinsi

c. Seksi Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah

6. Bidang Pengendalian, membawahi:

a. Seksi Pembinaan Internal

b. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan

c. Seksi Penyuluhan, Monitoring, dan Evaluasi

7. Unit Pengawasan Terpadu (UPT)

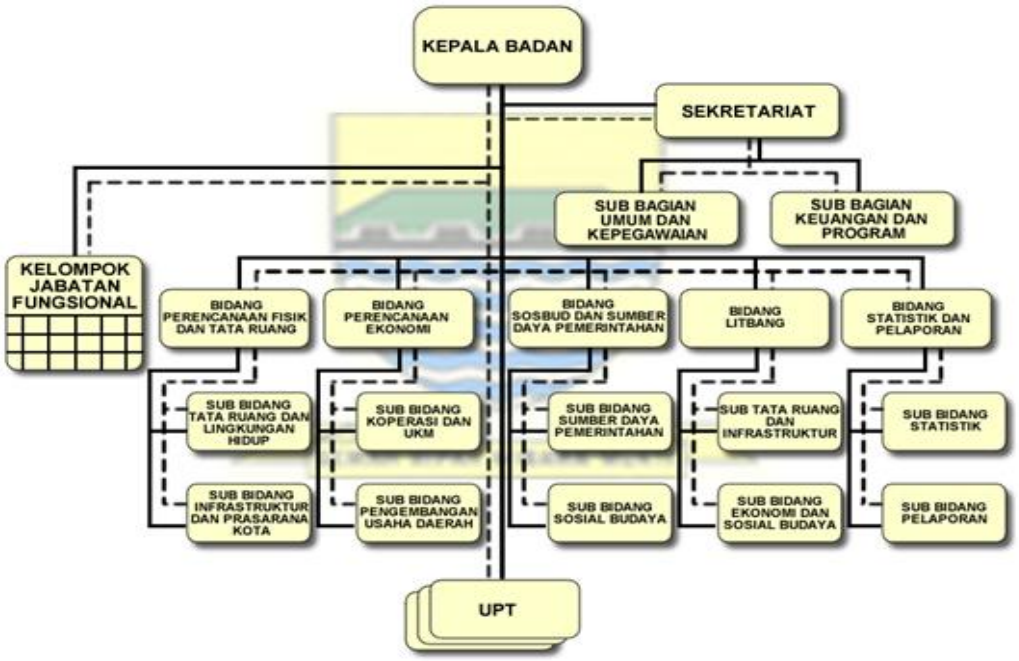
Unit Pengawasan Terpadu (UPT) dibagi menjadi 4 seksi berdasarkan wilayah kerjanya :

a. UPT Wilayah Bandung Utara

b. UPT Wilayah Bandung Selatan

c. UPT Wilayah Bandung Timur

d. UPT Wilayah Bandung Barat



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Bandung

4.1.1.4 Job Description

Dinas Pendapatan KotaBandung terdiri atas dua sub bagian, tiga bidang, dan sembilan seksi. Dinas Pendapatan Kota Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas sedangkan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Bidang/Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian Umum. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan dan pengelolaan pendapatan.

2. Sekretaris
    a. menyusun rencana kegiatan kesekretariatan
    b. Melaksanakan kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan
    c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan Dinas
    d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sekretariat

    A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
        a. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian
        b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas
        c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.

    B. Sub Bagian Keuangan dan Program
        a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas
        b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas

c. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program

3. Bidang Perencanaan

A. Seksi Data dan Potensi Pajak

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup data dan potensi pajak

b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup data dan potensi pajak

c. Pelaksanaan lingkup data dan potensi pajak yang meliputi inventasrisasi data dan potensi pajak, pengelolaan data potensi pajak dan retribusi, penyediaan informasi data pajak

B. Seksi Program

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup program

b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup program

c. Pelaksanaan lingkup program yang meliputi penyumpulan dan penyusunan konsep perencanaan dan program dinas; perencanaan sumber pendapatan daerah, serta penyusunan anggaran dan kebutuhan operasional dinas

4. Bidang Pajak Daerah

A. Seksi pelayanan dan Pengaduan

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa dan pelaporan
b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup analisa dan pelaporan
c. Pelaksanaan lingkup analisa dan pelaporan yang meliputi pendataan hasil pajak, evaluasi dan analisa pencapaian target pendapatan, penyusunan laporan berkala pendapatan dan statistik

B. Seksi Penetapan dan Pembukuan

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penetapan dan pembukuan.
b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup penetapan dan pembukuan.
c. Pelaksanaan lingkup penetapan dan pembukuan yang meliputi pelaksanaan analisa dasar perhitungan penetapan pajak terutang, pencatatan daftar penetapan realisasi pelaporan pelaksanaan penerimaan dan tunggakan pajak daerah.

C. Seksi Penagihan

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penagihan
b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup penagihan
c. Pelaksanaan lingkup penagihan yang meliputi inventarisasi pajak terutang, penyampaian dan pendistribusian Surat Tagihan Pajak, dan pelaksanaan penagihan.

5. Bidang Pendapatan Pajak Bukan Pajak Daerah

A. Seksi Adminisrasi Bagi Hasil Pajak Pusat

a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang adminisrasi bagi hasil pajak pusat, adminisrasi bagi hasil pajak provinsi dan adminisrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah

b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan adminisrasi bagi hasil pajak pusat, adminisrasi bagi hasil pajak provinsi dan adminisrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah.

c. Pelaksanaan di bidang adminisrasi bagi hasil pajak pusat, adminisrasi bagi hasil pajak provinsi dan adminisrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah.

B. Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Provinsi

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup adminisrasi bagi hasil pajak provinsi

b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup adminisrasi bagi hasil pajak provinsi.

c. Pelaksanaan lingkup adminisrasi bagi hasil pajak provinsi yang meliputi inventarisasi potensi dan pendapatan pajak pusat, pencatatan hasil pajak provinsi, pengadministrasian pajak provinsi dan penyetoran hasil pajak provinsi.

C. Seksi Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup adminisrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah.

b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup adminisrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah.

c. Pelaksanaan lingkup adminisrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah yang meliputi inventarisasi potensi dan pendapatan bukan pajak daerah, pencatatan hasil pajak bukan pajak daerah, pengadministrasian pajak bukan pajak daerah dan penyetoran hasil pajak bukan pajak daerah.

6. Bidang Pengendalian

A. Seksi Pembinaan Internal

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan internal.

b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup inventarisasi data aparatur, pembinaan dan pemantauan standar operasional prosedur.

c. Pelaksanaan lingkup pembinaan internal yang meliputi pembinaan internal.

B. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasan dan pemeriksaan.

b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pengawasan dan pemeriksaan.

c. Pelaksanaan lingkup pengawasan dan pemeriksaan yang meliputi inventarisasi dan koordinasi penentuan objek dan subjek pengawasan dan pemeriksaan, pemrosesan pelanggaran ketentuan pajak bekerjasama dengan instansi terkait.

C. Seksi Penyuluhan, Monitoring, dan Evaluasi

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring.

b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring.

c. Pelaksanaan lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring yang meliputi penyuluhan kepada wajib pajak, monitoring penerimaan dan pelaksanaan pemungutan pendapatan pajak dan bukan pajak daerah.

4.1.1.5 Aktivitas Perusahaan

Adapun aktivitas yang dilakukan oleh DPKAD kota bandung adalah:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, Yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
3. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.
4. Meningkatkan penataan Kota , yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika

peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota .

5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem keuangan kota , mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Hasil Analisis Deskriptif

Penelitian ini dilakukan pada DPKAD dan BAPPEDA Kabupaten Bandung, berikut ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh tingkat investasi dan pendapatan asli daerah terhadap produk regional bruto di Kota Bandung. Guna menjawab ketiga rumusan masalah penelitian, berikut ini akan diuraikan dan dianalisis data tingkat investasi, pendapatan asli daerah dan produk regional bruto di Kota Bandung selama periode tahun 2001-2010.

4.2.1.1 Perkembangan Tingkat Investasi Pada Pemerintahan Kota Bandung

Investasi adalah pinjaman dalam bentuk penyertaan modal, deposito, atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintahan Daerah. Tingkat investasi di Kota Bandung dihitung dari pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-

barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Berikut gambaran tingkat investasi di Kota Bandung selama periode tahun 2001-2010.

Tabel 4.1
Tingkat Investasi di Kota Bandung Periode Tahun 2001-2010

Tahun	Nilai Investasi	Perkembangan	Pertumbuhan
2001	Rp 668,007,678	-	-
2002	Rp 745,643,000	Rp 77,635,322	11.62%
2003	Rp 868,000,773	Rp 122,357,773	16.41%
2004	Rp 948,846,784	Rp 80,846,011	9.31%
2005	Rp 784,476,000	Rp (164,370,784)	-17.32%
2006	Rp 984,937,000	Rp 200,461,000	25.55%
2007	Rp 991,199,749	Rp 6,262,749	0.64%
2008	Rp 1,477,033,716	Rp 485,833,967	49.01%
2009	Rp 1,682,269,594	Rp 205,235,878	13.90%
2010	Rp 1,882,376,683	Rp 200,107,089	11.90%
Rata-Rata		**Rp 134,929,889**	**13.45%**

Sumber: BPMP kota bandung & Badan Pusat Statistik Kota Bandung

Pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat bagaimana tingkat investasi di Kota Bandung terus mengalami kenaikan dari tahun-ketahun, kecuali pada tahun 2005 yang sempat mengalami penurunan sebesar 17,32%. Secara rata-rata tingkat investasi di Kota Bandung mengalami kenaikan sebesar Rp 134,929,899 setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,45% setiap tahunnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) public terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

4.2.1.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kota Bandung

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumberdari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten Bandung dari tahun 2001-2010 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Perkembangan Pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Bandung
2001-2010

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	%
2001	Rp 126,782,348,151.29	Rp 123,984,485,749.23	97.79
2002	Rp 197,699,717,568.00	Rp 182,064,238,544.02	92.09
2003	Rp 229,749,164,455.00	Rp 213,029,461,862.25	92.72
2004	Rp 215,114,010,650.00	Rp 222,909,941,952.75	103.62
2005	Rp 213,100,251,482.00	Rp 225,596,438,613.00	105.86
2006	Rp 238,305,532,000.00	Rp 253,882,919,542.87	106.54
2007	Rp 281,981,582,738.93	Rp 287,249,534,044.93	101.87
2008	Rp 338,376,369,006.00	Rp 314,627,155,412.30	92.98
2009	Rp 369,137,442,213.08	Rp 360,152,627,960.00	97.57
2010	Rp 416,030,066,849.00	Rp 441,863,068,294.00	106.21

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Bandung

Pada tahun 2001 hingga tahun 2003 dapat diketahui Pendapatan Asli Daerah

tidak mencapai target Anggaran Pendapatan Asli Daerah dimana realiasasi kurang dari 100% atau lebih kecil dibandingan Anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2001 hingga tahun 2003 tidak efektif karena realisasi karena kurang dari 100%.

Pada tahun 2004 hingga tahun 2007 dapat diketahui ada pencapaian Pendapatan Asli Daerah dimana realisasi melebihi 100% atau lebih besar dibandingkan Anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2004 hingga tahun 2007 efektif karena realisasi lebih dari 100%.

Pada tahun 2008 hingga tahun 2009 diketahui Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target Anggaran Pendapatan Asli Daerah dimana realiasasi kurang dari 100% atau lebih kecil dibandingan Anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2008 hingga tahun 2009 tidak efektif karena realisasi kurang dari 100%

Pada tahun 2010 dapat diketahui ada pencapaian Pendapatan Asli Daerah dimana realisasi melebihi 100% atau lebih besar dibandingkan Anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2010 efektif karena realisasi lebih dari 100%.

Sebagai mana menurut (Mardiasmo, 2002:46) bahwa selama ini PAD memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah

4.2.1.3 Perkembangan Produk domestik Regional Bruto Pada Pemerintahan Kota Bandung

Produk regional bruto sering digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Berikut gambaran data produk regional bruto (PDRB) perkapita di Kota Bandung.

Tabel 4.3
Produk Regional Bruto Kota Bandung Periode Tahun 2001-2010

Tahun	PDRB	Perkembangan	Pertumbuhan
2001	Rp 17,435,720	-	-
2002	Rp 20,690,500	Rp 3,254,780	18.67%
2003	Rp 23,420,126	Rp 2,729,626	13.19%
2004	Rp 27,422,418	Rp 4,002,292	17.09%
2005	Rp 34,792,184	Rp 7,369,766	26.87%
2006	Rp 29,431,046	Rp (5,361,138)	-15.41%
2007	Rp 33,319,631	Rp 3,888,585	13.21%
2008	Rp 38,282,169	Rp 4,962,539	14.89%
2009	Rp 41,201,901	Rp 2,919,731	7.63%
2010	Rp 36,092,239	Rp (5,109,662)	-12.40%
Rata-Rata		**Rp 2,072,947**	**9.31%**

Sumber : BAPPEDA Kota Bandung

Selama periode tahun 2001-2010 produk regional bruto (PDRB) perkapita di Kota Bandung sempat mengalami penurunan dua kali, yaitu pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 15,41% dan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 12,40%. Namun secara rata-rata produk regional bruto (PDRB) perkapita Kota Bandung mengalami kenaikan sebesar Rp 2,072,947 setiap tahun

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,31% setiap tahunnya. Pertumbuhan PDRB, sebagai tolak ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono,2003).

4.2.2 Analisis Verifikatif

Pada bagian ini hipotesis penelitian yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan melalui uji statistik. Hipotesis penelitian seperti yang telah dituangkan di dalam bab II adalah adanya pengaruh dari variabel tingkat investasi dan pendapatan asli daerah terhadap produk regional bruto. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Namun karena terjadi multikolinieritas antara tingkat investasi dan pendapatan asli daerah, maka untuk menanggulangi hal tersebut dilakukan transformasi data (Gujarati, 2003:366). Pada penelitian ini tranformasi data dilakukan menggunakan logaritma natural (Ln).

4.2.2.1 Hasil Estimasi Model Regressi

Pada bagian ini akan disajikan hasil estimasi regresi pengaruh tingkat investasi dan pendapatan asli daerah terhadap produk regional bruto di Kota Bandung menggunakan regressi linear berganda. Data yang digunakan dalam analisis regresi berdasarkan data tahunan selama 10 tahun pengamatan. Bentuk model persamaan regressi yang akan diuji diformulasikan sebagai berikut.

$$\mathbf{Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \varepsilon}$$

Dimana:

Y = Produk regional bruto
X_1 = Tingkat investasi
X_2 = Pendapatan asli daerah
b_0 = konstanta
bi = koefisien regressi variabel Xi
ε = Pengaruh faktor lain

Model regressi tersebut digunakan untuk memprediksi dan menguji perubahan yang terjadi pada produk regional bruto yang dapat diterangkan atau dijelaskan oleh perubahan kedua variabel independen (tingkat investasi dan pendapatan asli daerah). Berdasarkan hasil pengolahan data tingkat investasi dan pendapatan asli daerah terhadap produk regional bruto di Kota Bandung di peroleh hasil regressi sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil Estimasi Model Regressi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.913	3.583		-.534	.610
	Ln_Investasi	-.209	.351	-.263	-.597	.569
	Ln_PAD	.894	.346	1.138	2.583	.036

a. Dependent Variable: Ln_PDRB

Melalui hasil pengolahan data seperti diuraikan pada tabel 4.4 maka dapat dibentuk model prediksi variabel tingkat investasi dan pendapatan asli daerah terhadap produk regional bruto sebagai berikut.

$$\mathbf{Y = 1{,}913 - 0{,}209\ X_1 + 0{,}894\ X_2}$$

Berdasarkan persamaan prediksi tersebut, maka dapat diinterpretasikan koefisien regressi dari masing-masing variabel independen sebagai berikut:

- Koefisien tingkat investasi sebesar 0,209 menunjukkan bahwa setiap kenaikan tingkat investasi sebesar satu persen diprediksi akan menurunkan produk regional bruto sebesar 0,209 persen dengan asumsi pendapatan asli daerah tidak mengalami perubahan.
- Koefisien pendapatan asli daerah sebesar 0,894 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pendapatan asli daerah sebesar satu persen diprediksi akan menaikkan produk regional bruto sebesar 0,894 persen dengan asumsi tingkat investasi tidak berubah.
- Nilai konstanta sebesar -1,913 persen menunjukan nilai prediksi rata-rata penurunan produk regional bruto apabila tingkat investasi dan pendapatan asli daerah sama dengan nol.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk menguji kesahihan atau keabsahan hasil estimasi model regressi. Beberapa asumsi klasik yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari hasil regressi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normlitas, uji multikolinieritas (untuk regressi linear berganda), uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi (untuk data yang berbentuk deret waktu). Pada penelitian ini keempat asumsi yang disebutkan diatas tersebut diuji karena variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini lebih dari satu dan data yang dikumpulkan mengandung unsur deret waktu (10 tahun pengamatan).

1) Uji Asumsi Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regressi, apabila model regressi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan,

karena statistik uji F dan uji t pada analisis regressi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regressi.

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters[a,b]	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.12362428
Most Extreme Differences	Absolute	.155
	Positive	.155
	Negative	-.123
Kolmogorov-Smirnov Z		.491
Asymp. Sig. (2-tailed)		.969

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Pada tabel 4.5 dapat dilihat nilai signifikansi (*asymp.sig*.) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,969. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regressi berdistribusi normal.

2) Uji Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar,

tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai *variance inflation factors* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Tabel 4.6

Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Ln_Investasi	.140	7.137
	Ln_PAD	.140	7.137

a. Dependent Variable: Ln_PDRB

Melalui nilai VIF yang diperoleh seperti pada tabel 4.6 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas, dimana nilai VIF dari kedua variabel bebas masih lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel bebas.

3) Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji *rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual(error). Apabila ada koefisien korelasi yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.7

berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing koefisien korelasi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual(error).

Tabel 4.7

Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Correlations

			absolut_error
Spearman's rho	Ln_Investasi	Correlation Coefficient	.309
		Sig. (2-tailed)	.385
		N	10
	Ln_PAD	Correlation Coefficient	.455
		Sig. (2-tailed)	.187
		N	10

Berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh seperti dapat dilihat pada tabel 4.7 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas), hal ini terlihat dari nilai signifikansi masing-masing koefisien korelasi kedua variabel bebas dengan absolut error (yaitu 0,385 dan 0,187) masih lebih besar dari 0,05.

4) Uji Asumsi Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu dalam model regresi atau dengan kata lain error dari observasi tahun berjalan dipengaruhi oleh error dari observasi tahun sebelumnya. Pada pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regressi dan berikut nilai Durbin-Watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regressi.

Tabel 4.8

Nilai Durbin-Watson Untuk Uji Autokorelasi
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.900[a]	.810	.755	.14018	1.690

a. Predictors: (Constant), Ln_PAD, Ln_Investasi
b. Dependent Variable: Ln_PDRB

Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai statistik Durbin-Watson (D-W) = 1,690, sementara dari tabel d pada tingkat kekeliruan 5% untuk jumlah variabel bebas = 2 dan jumlah pengamatan n = 10 diperoleh batas bawah nilai tabel (d_L) = 0,697 dan batas atasnya (d_U) = 1,641. Karena nilai Durbin-Watson model regressi (1,690) berada diantara d_U (1,641) dan 4-d_U (2,359), yaitu daerah tidak ada autokorelasi maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regressi. Karena keempat asumsi regressi sudah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi model regressi sudah memenuhi syarat BLUE (*best linear unbias estimation*) sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian hipotesis.

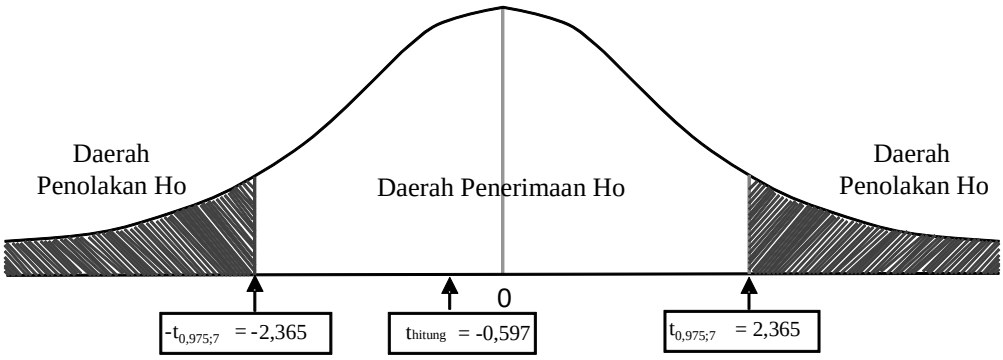
4.2.2.2 Pengaruh Tingkat investasi Terhadap Produk regional bruto

Diduga tingkat investasi berpengaruh terhadap produk regional bruto di Kota Bandung, karena itu peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

$Ho_1.\beta_1 = 0$: Tingkat investasi tidak berpengaruh terhadap produk regional bruto di Kota Bandung

$Ha_1.\beta_1 \neq 0$: Tingkat investasi berpengaruh terhadap produk regional bruto di Kota Bandung

Dari keluaran software SPSS seperti terlihat pada tabel 4.4 diperoleh nilai t_{hitung} variabel tingkat investasi sebesar -0,597 dengan nilai signifikansi sebesar 0,569. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,365 yang diperoleh dari tabel t pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas 7 untuk pengujian dua pihak. Karena nilai t_{hitung} (-0,597) lebih kecil dari t_{tabel} (2,365) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menerima Ho_1 sehingga Ha_1 ditolak. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa tingkat investasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk regional bruto di Kota Bandung.



Gambar 4.2
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Parsial
(Pengaruh Tingkat investasi)

Pada grafik diatas dapat dilihat nilai t_{hitung} (-0,597) jatuh pada daerah penerimaan Ho, sehingga disimpulkan bahwa tingkat investasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap produk regional bruto di Kota Bandung. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat investasi secara

parsial terhadap produk regional bruto dihitung korelasi perasial. Koefisien korelasi parsial antara tingkat investasi dengan produk regional bruto ketika pendapatan asli daerah tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9

Koefisien Korelasi Parsial Tingkat Investasi Dengan Produk Regional Bruto
Correlations

Control Variables			Ln_PDRB	Ln_Investasi
Ln_PAD	Ln_PDRB	Correlation	1.000	-.220
		Significance (2-tailed)	.	.569
		df	0	7
	Ln_Investasi	Correlation	-.220	1.000
		Significance (2-tailed)	.569	.
		df	7	0

Koefisien korelasi parsial antara tingkat investasi dengan produk regional bruto ketika pendapatan asli daerah tidak berubah adalah sebesar 0,220 dengan arah negatif. Artinya tingkat investasi memiliki hubungan yang lemah/rendah dengan produk regional bruto ketika pendapatan asli daerah tidak mengalami perubahan. Arah hubungan negatif menunjukkan bahwa ketika tingkat investasi meningkat, sementara pendapatan asli daerah tidak berubah maka produk regional bruto justru menurun. Kemudian besar pengaruh tingkat investasi terhadap produk regional bruto ketika pendapatan asli daerah tidak berubah adalah $(-0{,}220)^2 \times 100\% = 4{,}8\%$. Artinya tingkat investasi hanya memberikan pengaruh sebesar 4,8% terhadap produk regional bruto di Kota Bandung.

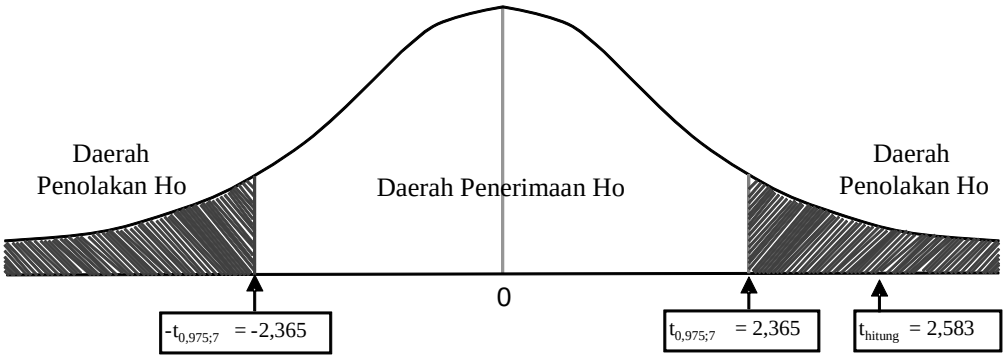
4.2.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Diduga pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto di Kota Bandung, karena itu peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho_2. $\beta_2 = 0$: Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto di Kota Bandung

Ha_2. $\beta_2 \neq 0$: Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto di Kota Bandung

Dari keluaran software SPSS seperti terlihat pada tabel 4.4 diperoleh nilai t_{hitung} variabel pendapatan asli daerah sebesar 2,583 dengan nilai signifikansi sebesar 0,036. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,365 yang diperoleh dari tabel t pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas 7 untuk pengujian dua pihak. Karena nilai t_{hitung} (2,583) lebih besar dari t_{tabel} (2,365) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho_2 sehingga Ha_2 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk regional bruto di Kota Bandung.



Gambar 4.3
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Parsial
(Pengaruh Pendapatan asli daerah)

Pada grafik diatas dapat dilihat nilai t_{hitung} (2,583) jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Kota Bandung. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah secara parsial terhadap produk domestik regional bruto dihitung korelasi perasial. Koefisien korelasi antara pendapatan asli daerah dengan produk domestik regional bruto ketika tingkat investasi tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10

Koefisien Korelasi Parsial Pendapatan Asli Daerah

Dengan Produk Domestik Regional Bruto

Correlations

Control Variables			Ln_PDRB	Ln_PAD
Ln_Investasi	Ln_PDRB	Correlation	1.000	.699
		Significance (2-tailed)	.	.036
		Df	0	7
	Ln_PAD	Correlation	.699	1.000
		Significance (2-tailed)	.036	.
		Df	7	0

Hubungan antara pendapatan asli daerah dengan produk domestik regional bruto ketika tingkat investasi tidak berubah adalah sebesar 0,699 dengan arah positif. Artinya pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang kuat/ erat dengan produk domestik regional bruto ketika tingkat investasi tidak mengalami perubahan. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa ketika pendapatan asli daerah meningkat, sementara tingkat investasi tidak berubah maka produk domestik regional bruto juga akan meningkat. Kemudian besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap produk domestik regional bruto ketika tingkat investasi tidak berubah adalah $(0,699)^2 \times 100\% = 48,9\%$. Artinya pendapatan asli daerah memberikan pengaruh sebesar 48,9% terhadap produk domestik regional bruto di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil perhitungan besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap produk domestik regional bruto dapat diketahui bahwa diantara kedua variabel independen, pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap produk domestik regional bruto dibanding tingkat investasi.

4.2.2.4 Pengaruh Tingkat Investasi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Selanjutnya untuk membuktikan apakah tingkat investasi dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Kota Bandung, dilakukan pengujian secara bersama-sama dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho_3 : Semua $\beta i = 0$ Tingkat investasi dan pendapatan asli daerah secara

i = 1,2	bersama-sama tidak berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto di Kota Bandung
Ha_3 : Ada $\beta i \neq 0$ i = 1,2	Tingkat investasi dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto di Kota Bandung

Untuk menguji hipotesis di atas digunakan statistik uji-F yang diperoleh melalui tabel anova seperti yang tertera pada tabel 4.11 di bawah ini:

Tabel 4.11

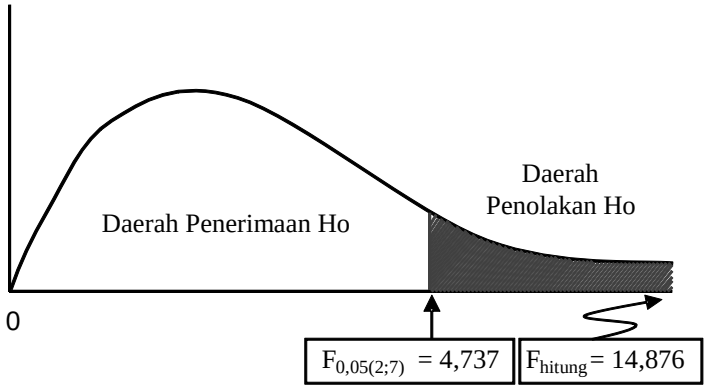
Anova Untuk Pengujian Koefisien Regresi secara Bersama-sama

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.585	2	.292	14.876	.003[b]
	Residual	.138	7	.020		
	Total	.722	9			

a. Dependent Variable: Ln_PDRB
b. Predictors: (Constant), Ln_PAD, Ln_Investasi

Berdasarkan tabel anova di atas dapat dilihat nilai F_{hitung} hasil pengolahan data sebesar 14,876 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 dan nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel. Dari tabel F pada α = 0.05 dan derajat bebas (2;7) diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 4,737. Karena F_{hitung} (14,876) lebih besar dari F_{tabel} (4,737) maka pada tingkat kekeliruan 5% (α=0.05) diputuskan untuk menolak Ho_3 sehingga Ha_3 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa tingkat investasi dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Kota Bandung.



Gambar 4.4
Grafik Daerah penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Simultan

Pada grafik diatas dapat dilihat nilai F_{hitung} (14,876) jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga disimpulkan bahwa tingkat investasi dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Kota Bandung. Untuk mengetahui kekuatan hubungan antara kedua variabel independen (tingkat investasi dan pendapatan asli daerah) secara bersama-sama dengan variabel produk domestik regional bruto dihitung koefisien korelasi berganda. Koefisien korelasi tingkat investasi dan pendapatan asli daerah secara simultan dengan produk domestik regional bruto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Koefisien Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.900[a]	.810	.755	.14018	1.690

a. Predictors: (Constant), Ln_PAD, Ln_Investasi
b. Dependent Variable: Ln_PDRB

Nilai R pada tabel 4.12 menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel bebas (tingkat investasi dan pendapatan asli daerah) secara simultan dengan produk domestik regional bruto. Jadi pada permasalahan yang sedang diteliti

diketahui bahwa secara simultan kedua variabel bebas (tingkat investasi dan pendapatan asli daerah) memiliki hubungan yang sangat kuat/sangat erat dengan produk domestik regional bruto. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berganda (R) sebesar 0,900 berada diantara 0,80 hingga 1,00 yang termasuk dalan kriteria korelasi yang sangat kuat. Jadi sebagai tolak ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peranan pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Selama ini PAD dan stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional dan memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002:46).

Selain korelasi berganda juga dihitung koefisien determinasi, yaitu suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Pada permasalahan yang sedang diteliti diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,810 yaitu nilai R-Square pada tabel 4.12. Artinya kedua variabel bebas yang terdiri dari tingkat investasi dan pendapatan asli daerah secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada produk domestik regional bruto sebesar 81,0 persen. Dengan kata lain secara bersama-sama kedua variabel bebas (tingkat investasi dan pendapatan asli daerah) memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 81,0% terhadap produk domestik regional bruto di Kota Bandung. Sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti adalah sebesar 19,0%, merupakan pengaruh faktor lain diluar tingkat investasi dan pendapatan asli daerah yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan transfer pemerintah provinsi.